

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Dasar pemikiran

Buku teks pelajaran merupakan buku yang berisi pengetahuan-pengetahuan kemudian dijadikan sebagai bahan ajar. Menurut Nasution buku ajar/ buku teks merupakan bahan ajar yang dihasilkan oleh seorang pengarang atau tim pengarang yang disusun berdasarkan kurikulum atau tafsiran kurikulum yang berlaku. (Sitepu, 2012)

Buku teks ini tidak hanya sebagai bahan ajar, namun juga sebagai pedoman bagi guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Seperti yang tercantum pada peraturan menteri nomor 11 tahun 2005, buku teks pelajaran merupakan buku acuan wajib untuk digunakan di sekolah yang memuat materi pembelajaran dalam rangka peningkatan keimanan dan ketakwaan, budi pekerti dan kepribadian, kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepekaan dan kemampuan estetis, potensi fisik dan kesehatan yang disusun berdasarkan standar nasional pendidikan. Dalam penulisannya buku teks memerlukan adanya kurikulum, karena kurikulum merupakan acuan dalam menulis buku teks pelajaran. Sasaran, tujuan, materi/bahan dan metode penyajian materi/bahan terdapat dalam kurikulum. (Sitepu, 2012)

Berdasarkan paparan diatas, buku teks harus sesuai dengan tujuan pembelajaran berdasarkan kurikulum dan harus menetapkan nilai-nilai baik peraturan UU atau nilai-nilai agama.(Sitepu, 2012) Artinya penggunaan materi yang ada pada kurikulum harus sangat diperhatikan dari segi manapun. Materi dalam

buku teks harus disajikan dengan mempertimbangkan segala konsekuensi yang ada yaitu seperti terjadinya perubahan sistem politik, sosial budaya, ekonomi serta berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam pelajaran sejarah, penulisan materi buku teks mata pelajaran sejarah di sekolah mengikuti perkembangan penulisan sejarah (Historiografi) atau perkembangan sejarah di Indonesia. Ciri pentingnya yaitu pada penulisan sejarah mengikuti masing-masing jiwa zamannya atau bisa dibidang periode. Setiap jaman tertentu akan menghasilkan suatu jenis penulisan sejarah dengan corak tertentu pula. Sehingga pada kurikulum akan berubah sesuai zamannya begitupula pada buku teks, mengikuti perubahan yang ada pada kurikulum sebagai acuan dalam pembuatan buku (Darmawan, 2019).

Dalam penggunaannya terkadang buku teks mengalami permasalahan-permasalahan terkait muatan materi yang ada didalamnya seperti yang terjadi pada buku teks mata pelajaran sejarah yang menggunakan Kurikulum 2004 atau Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Buku-buku ini mengalami permasalahan terkait salah satu materi pokok yaitu Peristiwa G 30 September 1965 dan pengalihan kekuasaan. Buku ini resmi dilarang dalam penggunaannya dan peredarannya melalui surat keputusan Kejaksaan Agung dengan nomor KEP 019/A/JA/03/2007 tentang larangan beredar barang cetakan buku-buku teks pelajaran sejarah SMP/MTS dan SMA/MA/SMK yang mengacu pada "Kurikulum 2004", 3 Maret 2007.

Pelarangan buku-buku teks pelajaran sejarah ini termasuk ke dalam salah satu bentuk praktek pelarangan buku yang terjadi di Indonesia. Tidak hanya buku-buku pelajaran saja, buku yang dilarang berupa buku bacaan yang dianggap

mengganggu ketertiban umum. Dalam sejarahnya, pelarang buku di Indonesia sudah terjadi sejak masa kolonial. Bentuknya berupa pemenjaraan atau pengasingan seseorang karena hasil karyanya dianggap berlawanan dengan pandangan politik dan kebijakan pemerintah kolonial. Setelah merdeka, pelarangan buku tetap berlanjut, bahkan dengan eskalasi yang terus meningkat, yakni dari masa Demokrasi Terpimpin di bawah kendali Soekarno dan mencapai puncaknya pada masa Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto. Setelah Orde Baru tumbang diganti era Reformasi, pelarangan buku dianggap tidak ada lagi. Namun, kondisi bebas pelarangan buku tersebut ternyata tidak berlangsung lama. Era Reformasi yang mengusung agenda kebebasan berekspresi dan penegakan hak asasi manusia kembali melanggengkan praktik pelarangan buku. (Yusuf, 2010).

Seperti yang terjadi pada buku teks mata pelajaran sejarah kurikulum 2004. Pelarangan buku-buku sejarah ini terjadi di era reformasi dimana pada saat ini diberlakukan juga Kurikulum baru yaitu kurikulum 2004 atau KBK. Kurikulum 2004 disusun sejak tahun 2001 dan saat terjadinya pelarangan ini Kurikulum 2004 masih menjadi piloting di beberapa sekolah. Penggunaan materi pada buku-buku pelajaran sejarah yang dilarang ini sudah sesuai dengan rumusan materi yang ada pada kurikulum, dimana materi tersebut telah mengalami perubahan sesuai dengan penulisan sejarah pada zamannya, yaitu era reformasi, lantas apa yang menyebabkan buku ini bisa dilarang jika pembuatannya sudah sesuai dengan kurikulum yang berlaku saat itu.

Dalam penelitian ini, peneliti tertarik untuk membahas lebih dalam skripsi tentang **“Pelarangan Buku Teks Mata Pelajaran Sejarah Berdasarkan Kurikulum 2004”**

### **B. Pembatasan dan perumusan masalah**

Pembatasan permasalahan dalam penelitian ini adalah Pelarangan Buku Teks Mata Pelajaran Sejarah Berdasarkan Kurikulum 2004. Peneliti memfokuskan penelitian ini pada tahun 2005 yaitu berawal dari pengaduan Yusuf Hasyim, Taufik Ismail dan Fadli Zon ke Dewan Perwakilan Rakyat, bahwa di Jawa Timur ditemukan buku Pelajaran Sejarah untuk siswa SMP dan SMA yang tidak mencantumkan keterlibatan Partai Komunis Indonesia (PKI) dalam Peristiwa Madiun 1948 dan pembunuhan petinggi TNI AD tahun 1965, hingga dilakukannya razia dan pemusnahan buku-buku tersebut di Kejaksaan Tinggi setiap daerah di Indonesia pada tahun 2007. Hal itu dilakukan setelah dikeluarkan surat keputusan tentang larangan beredar buku-buku tersebut.

Setelah melihat dasar pemikiran dan pembatasan masalah yang telah diuraikan di atas, terdapat tiga perumusan masalah penelitian, antara lain:

1. Mengapa buku teks mata pelajaran sejarah berdasarkan kurikulum 2004 bisa dilarang?
2. Bagaimana pelaksanaan pelarangan buku teks mata pelajaran sejarah bedasarkan kurikulum 2004?

### **C. Tujuan dan kegunaan penelitian**

Penelitian yang berjudul “Pelarangan Buku Teks Mata Pelajaran Sejarah Berdasarkan Kurikulum 2004”, bertujuan untuk:

1. Menjelaskan latar belakang penarikan buku teks sejarah berdasarkan kurikulum 2004
2. Memaparkan proses dari penarikan buku teks sejarah berdasarkan kurikulum 2004

Jadi, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang larangan beredarnya buku teks sejarah yang mengacu pada kurikulum 2004. Kegunaan dalam penelitian ini diharapkan menjadi sumber bacaan dan menambah khazanah pengetahuan tentang masalah larangan beredarnya buku teks sejarah yang mengacu pada kurikulum 2004 walaupun tidak memunculkan teori baru. Secara praktis dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran sejarah pendidikan ditingkat sekolah lanjutan dan perkuliahan.

#### **D. Metode dan bahan sumber**

Penelitian sejarah ini disajikan dengan menggunakan metode deskriptif-naratif. Peneliti berusaha menguraikan tentang peristiwa larangan beredarnya buku teks sejarah yang mengacu kurikulum 2004. Penelitian sejarah ini secara umum mempunyai tahapan yaitu pengumpulan sumber (heuristik), verifikasi (kritik sejarah, keabsahan sumber), interpretasi: analisis dan sintesis, dan historiografi atau penulisan. (Gottschalk & Notosusanto, 1975) penelitian ini dijabarkan secara operasional melalui langkah-langkah penelitian sebagai berikut :

Pertama, tahap heuristik (pengumpulan sumber) adalah menemukan sumber atau referensi yang berkaitan dengan topik penelitian. Sumber dibagi menjadi 2, yaitu sumber primer dan sekunder. Sumber primer sebagai kesaksian seseorang dengan mata kepala sendiri atau dengan menggunakan alat mekanik, sedangkan sumber sekunder adalah kesaksian dari siapapun yang bukan merupakan saksi pandangan mata, yaitu seseorang yang tidak hadir pada peristiwa yang dikisahkan. (Gottschalk & Notosusanto, 1975) Sumber primer yang telah ditelusuri penulis adalah Koran-koran yang memuat berita tentang pelarangan dan surat keputusan larangan beredar barang cetakan buku-buku teks pelajaran sejarah SMP/MTS dan SMA/MA/SMK yang mengacu pada "Kurikulum 2004" yang telah ditelusuri di perpustakaan nasional Indonesia dan kejaksaan republik Indonesia. Sumber primer lain yang telah ditelusuri juga berupa wawancara dengan seorang salah satu penulis buku teks mata pelajaran sejarah yang dilarang. Buku-buku yang menjadi sumber sekunder di antaranya adalah buku yang membahas tentang pelarangan buku yaitu *Menentang Peradaban Pelarangan Buku Di Indonesia, Pelarangan Buku Di Indonesia : Sebuah Paradoks Demokrasi Dan Kebebasan Berekspresi, Mengubur Peradaban, Mengubur Peradaban Pelarangan Buku Di Indonesia Dan Artikel Dalam Jurnal Tim Institute Sejarah Social Indonesia* .kemudian buku tentang Kurikulum berbasis kompetensi 2004 diantaranya yaitu *Pengembangan Kurikulum, Dasar-Dasar Dan Pengembangannya, Catatan Kritis Tentang Kurikulum Berbasis Kompetensi, Paradigma Pendidikan Demokratis, Sebuah Model Pelibatan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pendidikan, Pembelajaran Dalam Implementasi Kurikulum*

*Berbasis Kompetensi* serta buku lainnya yang berhubungan dengan politik era reformasi, pendidikan dan kurikulum 2004 atau Kurikulum Berbasis Kompetensi, yang diperoleh dari perpustakaan UPT Universitas Negeri Jakarta, Perpustakaan Nasional jalan Salemba Raya dan jalan Medan Merdeka Selatan, Perpustakaan Universitas Indonesia dan koleksi pribadi.

Kedua, tahap kritik/ verifikasi. Verifikasi adalah melakukan kritik terhadap sumber sejarah untuk mendapatkan keaslian dan kredibilitas data. Kritik dilakukan secara ekstern maupun intern. Kritik ekstern dilakukan dengan cara mencari otentitas atau keaslian data dengan membandingkan dokumen yang ditulis pada tahun yang sama, bahan (kertas, stempel, dan huruf yang digunakan), dan materi dokumen.(Gottschalk & Notosusanto, 1975) Sedangkan kritik intern dilakukan dengan mencari objektivitas dan mempersoalkan apakah isi yang terdapat dalam sumber itu dapat memberikan Informasi yang diperlukan.(Gottschalk & Notosusanto, 1975) Dari sebuah isi tulisan membandingkan dengan tulisan lainnya yang sesuai konteks larangan beredar buku teks sejarah yang mengacu kurikulum 2004.

Sebagai contoh penggunaan sumber berupa salinan surat keputusan larangan beredar barang cetakan buku-buku teks pelajaran sejarah smp/mts dan sma/ma/smk yang mengacu pada "Kurikulum 2004". Sumber tersebut mempunyai kredibilitas tinggi karena telah dikonfirmasi oleh pihak departemen tersebut yang pernah melihat surat yang asli, bahwa salinan itu benar adanya dan sudah terdapat di Kejaksaan Republik Indonesia.

Ketiga, tahap interpretasi. Fakta sejarah suatu peristiwa yang telah melewati tahap verifikasi kemudian diinterpretasikan. Fakta sejarah suatu peristiwa yang didapat dari sumber primer (majalah/ surat kabar) dan sumber sekunder (buku) tersebut harus diurutkan sesuai waktu yang terjadi dalam kesatuan yang masuk akal sesuai dengan pendekatan deskriptif-naratif. Artinya, proses sejarahnya harus kronologis, agar saling melengkapi dan saling terkait antara kejadian satu dengan kejadian yang lainnya. Interpretasi kemudian digunakan untuk mengaitkan satu kejadian dengan kejadian lainnya agar mampu mendekati objektivitas dan menghindari subjektivitas. (Gottschalk & Notosusanto, 1975)

Keempat, tahap historiografi, yaitu menuliskan fakta sejarah suatu peristiwa yang telah didapatkan pada tahapan-tahapan sebelumnya. Historiografi adalah rekonstruksi yang imajinatif dari masa lampau berdasarkan data yang diperoleh untuk menempuh proses. (Gottschalk & Notosusanto, 1975) Historiografi merupakan langkah akhir dari metode sejarah, hasil penelitian dituliskan secara kronologis. Proses kausalitas (sebab-akibat) dituliskan secara mengalir dan detail, dan setiap potongan-potongan kejadian direkonstruksikan dalam penulisan.

Urutan rekonstruksi dalam penelitian ini adalah pertama peneliti akan membahas tentang sejarah pelarangan buku yang terjadi di Indonesia, kemudian membahas tentang bagaimana kurikulum 2004 bisa terbentuk dan Lembaga-lembaga yang melegalkan pelarangan buku, kemudian tentang larangan beredarnya buku teks sejarah yang mengacu kurikulum 2004 dan prosesnya.